

Membumikan Sistem Ekonomi Islam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Semesta

Oleh: H. Muhammad Djakfar

A. Kegelisahan Akademik: Mengapa Harus Dibumikan?

Sebagaimana kita ketahui bahwa di tataran global secara realitas sejatinya ada dua sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Keduanya adalah sistem kapitalis dan sosialis (komunis). Kedua sistem inilah yang telah sedemikian lama mengakar di dalam pikiran atau menjadi *mindset* hampir seluruh masyarakat internasional sampai abad digital dewasa ini. Kendati perlu diakui bahwasanya sistem yang kedua, yakni sosialis saat ini sudah meredup auranya dan banyak ditinggal oleh pengikutnya sehingga kendali ekonomi dunia praktis didominasi oleh sistem kapitalis.

Namun demikian, sistem sekuler yang bersumber dari hasil renungan akal manusia (sains) itu menurut pandangan para pakar telah gagal membangun kesejahteraan di kalangan umat manusia (Chapra, 2000). Dengan sistem kapitalis yang selama ini telah dianggap *sophisticated* dan dianggap mampu membangun ekonomi semesta dan mensejahterakan ekonomi umat manusia ternyata justru terjadi hal yang sebaliknya. Yakni terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan dalam skala massif dan terus berkelanjutan hingga dewasa ini. (Zohar, 2005; Qardhawi, 1995; Chapra, 2000); Amin, 2012). Bahkan menurut Roy dan Glyn Davies, Francisco LR dan Luis R. Batiz: “Selama abad 20, tidak kurang dari 32 krisis ekonomi global melanda dunia” (Antonio, 2007; Djakfar, 2015))

Rasanya sulit diprediksi kapan kiranya ketidakadilan global ini akan segera berakhir. Bukankah dalam kenyataan keseharian dapat kita saksikan secara kasat mata yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Demikian pula pemanasan global, sebagai pertanda semakin rentannya ekosistem yang terus

memprihatinkan sebagai dampak pembangunan industri dalam skala besar, baik dalam kaitan dengan penggunaan bahan baku dari alam maupun masalah pembuangan residu yang tidak jarang menimbulkan masalah lingkungan yang serius, tidak lepas karena imbas sistem ini.

Dalam tataran global tidak sedikit berbagai negara berkembang (*developing countries*), terlebih lagi negara miskin (*underdeveloped countries*) masih terlilit utang karena pihak pengutang, baik negara kaya maupun lembaga keuangan internasional seperti IMF maupun Bank Dunia mengeterapkan sistem bunga (ribawi-interest) sebagaimana yang diajarkan oleh paham kapitalis. Demikian pula dalam tataran mikro, tidaklah sedikit para pengusaha kecil yang sedemikian sulit untuk mendapatkan akses permodalan sehingga untuk mengembangkan usaha tidak jarang pula mereka harus terjebak ke dalam agen peminjam modal yang juga mengeterapkan sistem ribawi pula. Dan dengan dalih ingin membantu yang kecil dan lemah, sejatinya mereka mencekik secara sistemik dan tersamar, namun tidak disadari oleh yang menjadi objek penderita karena mereka terdesak untuk mempertahankan hidup (Bandingkan dengan Amin, 2012)

Dengan bertolak dari kenyataan di atas, pertanyaan mendasar adalah kapankah ketidakadilan global itu segera berakhir. Jika tidak, kapankah kesejahteraan semesta yang melingkupi seluruh kehidupan, baik lahir maupun batin, materiil maupun spiritual, duniawi maupun ukhrawi bisa segera terwujud dan dapat dinikmati oleh seluruh makhluk hidup terutama oleh manusia di planet bumi ini. Bukankah kesejahteraan semesta itu merupakan refleksi dari ajaran *rahmatan lil 'alamin* yang menjadi idealisme ajaran Islam yang bersumber dari ajaran wahyu.

Sebab itu sangatlah logis sekali apabila para pakar mengemukakan bahwa ekonomi Islam perlu menjadi bagian solusi (*way out*) dalam mengatasi krisis global sebagai dampak dari sistem sekuler yang selama ini menjadi madzhab rujukan ekonomi dunia (Boediono, dalam *Republika*, 9 Juni 2009). Artinya, sebagai bagian dari ajaran wahyu yang universal yang bersumber pokok dari Alquran dan Sunnah, maka ekonomi

Islam diharapkan mampu memberi solusi komprehensif (*kaffah*) yang berkeadilan dan mengedepankan nilai-nilai etis yang dapat dirasakan oleh seluruh kehidupan semesta (Afzalurrahman, 1997; Antonio, 2007). Bukankah ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan sebuah konstruksi ajaran *Ilahiyah-Rabbaniyyah (divine)*, yakni Tuhan semesta alam Yang Maha Adil, Maha Rahman dan Rahim kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya tanpa kecuali. Untuk itu sebagai konsekuensinya, baik dalam tataran normatif maupun praksis hendaknya para pelaku ekonomi Islam harus mampu menerjemahkan dan mengaplikasikan sifat-sifat Tuhan itu ke dalam dunia ekonomi kapan pun dan di mana pun saja. Inilah sejatinya esensi ajaran ekonomi Islam yang dicita-citakan yang akan dapat menciptakan kesejahteraan semesta yang menjadi harapan kita bersama.

Menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian dari solusi kemelut ekonomi sistem sekularistik nampaknya sejalan dengan *trend global* yang mulai memperhatikan nilai-nilai spiritualistik, terutama yang bersumber dari ajaran agama (*religion*) (Kartajaya, 2006). Di antaranya adalah yang bersumber dari ajaran Islam yang saat ini populasi pemeluknya semakin berkembang, baik di Asia maupun Eropa (Republika).

Namun demikian perlu diakui secara jujur, bahwasanya mengaplikasikan nilai-nilai ekonomi Islam di tengah maraknya kekuatan dan pertarungan *mindset* sistem sekuler yang telah sedemikian mengakar di dalam pikiran kalangan masyarakat luas tidaklah mudah. Inilah kiranya di antara tantangan dan kendala untuk dapat mewujudkan kesejahteraan semesta yang diidealkan dan dicita-citakan oleh ajaran Islam secara komprehensif dan universal. Untuk itu, maka perlu terus dilakukan sosialisasi (dibumikan) nilai-nilai itu agar lebih banyak dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas dengan menggunakan berbagai strategi dan sarana yang ada.

Inilah sejatinya permasalahan yang diwacanakan di dalam diskursus (*maqalah*) ini dengan harapan akan dapat memberikan kontribusi pemikiran ke depan, baik dalam tataran pengembangan akademik maupun mencarikan solusi secara *kaffah* atas prahara ekonomi di masa yang akan datang.

B. Titik Lemah Sistem Sekuler: Pandangan Antarpakar

Sebagaimana kita pahami, bahwasanya sistem ekonomi sekuler, baik yang berpaham kapitalistik maupun komunistik jelas bertumpu atau merupakan sublimasi dari produk pemikiran akal manusia yang untuk kemudian menghasilkan sebuah sains. Yakni ilmu ekonomi dengan segala teori-teorinya yang dijadikan landasan mendasar implementasi dan aplikasinya. Teori-teori inilah yang hingga saat ini masih menjadi rujukan utama praktik ekonomi masyarakat global.

Tetapi di balik sistem ekonomi yang telah dianggap mapan oleh para pendukungnya itu, akhir-akhir ini terkoreksi bahwa sistem sekuler tidak dapat menjadi rujukan komunitas Muslim, karena mereka tidak mampu memenuhi aspek spiritual dan material manusia. Tidak seperti konsep Islam tentang *falah* dan *hayatan thayyibah* yang mengedepankan *ukhuwah* (Chapra,2000; An-Nabhani,1996). Tentu saja penilaian semacam ini adalah wajar sekali karena bagaimanapun masyarakat global mulai kritis dalam menilai semua fenomena yang terjadi.

Sistem ekonomi produk akal hanyalah terbatas menterminologikan kebahagiaan lahir semata. Ia tidak akan mampu menembus wilayah kebahagiaan hakiki dan makna hidup universal yang menyentuh ranah, tidak saja yang lahir (duniawi) namun juga yang batini secara bersamaan. Kepentingan duniawi bersifat temporer (sekejap), sedangkan ukhrawi merupakan kehidupan yang abadi. Bahkan Islam menegaskan kehidupan ukhrawi jauh lebih krusial daripada kehidupan duniawi yang fana. Kehidupan akhirat merupakan kelanjutan dari kehidupan di dunia (Adh-Dhuha, 93:4)).

Namun demikian dalam kenyataan, akhir-akhir ini di kalangan Muslim sendiri agaknya mereka tidak lagi mencerminkan aspek spiritual Islam. Dengan kata lain, sebagian besar mereka kurang memiliki kesadaran dan nilai-nilai yang dituntut oleh Islam (Chapra, 2000). Disadari atau tidak, nampaknya mereka lebih merasa nyaman mempraktikkan nilai-nilai ekonomi sekuler yang lebih banyak menekankan pada kepentingan materialistik yang *profane*. Kurang peduli atau bahkan acuh sama sekali dengan nilai-nilai spiritualistik yang transenden. Tegasnya, selama ini umat Islam lebih

memilih jalan ekonomi yang kering nilai-nilai spiritual yang di dalam sistem ekonominya dipandu oleh ajaran wahyu (Tuhan).

Untuk itu, sebagai konsekuensinya yang jauh dari nilai-nilai spiritualistik, maka para pelaku ekonomi sekuler dalam menjalankan aktivitasnya lebih banyak dikendalikan oleh ego (syahwat) primordial dan berkecenderungan melepas tanggung jawab perbuatannya kepada pihak lain. Dalam hal ini antara lain dapat disimak pernyataan Zorah dan Marshall (2005) yang menyatakan bahwa “menurut kaum sekuler, lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah, tujuan pokok bisnis adalah melayani permintaan pelanggan untuk meraup keuntungan, karena itu bekerja hanyalah untuk mendapatkan uang.”

Dari pernyataan di atas sangat terbaca bagaimana sikap *egoistic (ananiyah)* kaum ekonomi sekuler yang nampaknya kurang begitu peduli pada masalah ekosistem yang sejatinya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun kalangan usaha (industri). Karena bagaimanapun tujuan membangun usaha sejatinya tidaklah hanya sebatas mengejar keuntungan (*profit-ribhun*) semata, namun di balik itu ada nilai-nilai kebajikan yang bernilai ibadah kepada Tuhan. Karena itu perlu ada keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual yang sangat ditekankan di dalam sistem ekonomi Islam. Sebab itu dalam kaitan ini Sya’rawi menyatakan “bagaimanapun doktrin kapitalis dan komunis/sosialis perlu dilakukan revisi sebagai koreksi atas kesalahan ajarannya. Untuk itu, diperlukan kehadiran Islam yang menjembatani antara keduanya (*wasathiyah/moderasi*)” (Sya’rawi, 1991).

Bagaimanapun madzhab kapitalisme dan komunisme, tidak sejalan dengan Islam karena posisi ajarannya berada di salah satu kedua kutub ekstrim (ke kiri atau ke kanan) sehingga menimbulkan bias (*ambigu*) dalam solusi-solusinya. Untuk itu untuk mendukung sistem ekonomi Islam, maka perlu formulasi berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan (Kahf, 1979). Krisis ekonomi jelas merupakan prahara bagi umat manusia. Sebaliknya bagi para pengikut madzhab sekuler, krisis adalah panen. Karena

itu model ekonomi yang dibisikkan oleh mereka adalah seakan-akan sistem yang terbaik bagi umat manusia.” (Amin, 2012).

Karena itu menurut Lester C. Thurrow tugas kita sekarang tidak lagi mencari preskripsi, formulasi maupun metodologi baru, namun perlu adanya upaya sungguh-sungguh untuk mengeksplorasi paradigma baru yang menjadi dasar ekonomi *mainstream*” (Naqvi, 1994). Tentu saja paradigma baru itu tidak saja yang berbasiskan sains semata, namun juga yang tidak kalah krusialnya adalah yang berbasiskan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari ajaran wahyu sebagaimana yang menjadi paradigma ekonomi Islam.

C. Karakteristik Ekonomi Islam: Ekstraksi Aspek-Aspek

Banyak aspek yang dikemukakan oleh para pakar yang menggambarkan distingsi ekonomi berbasis syariah dengan yang sekuler. Di samping ada sisi persamaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, namun juga dapat ditemui beberapa perbedaan di antara pandangan mereka. Di antaranya adalah Yusuf Qardhawi yang memetakan karakter ekonomi Islam meliputi empat aspek, yakni *uluhiyah-rabbaniyah* (*divine*), *insaniyah* (humanis), *akhlaqiyah* (moral), *wasathiyah* (*balance/tawazun*)) (Qardhawi, 1995).

Pendapat lain, dalam hal ini Umer Chapra agak berbeda dengan pendapat Qardhawi. Chapra mengemukakan tiga aspek yang menjadi ciri utama ekonomi Islam. Yang pertama adalah aspek *tawhid* (keesaan Tuhan). Sedangkan yang kedua, *khilafah* (perwakilan) yang di dalamnya meliputi adanya persaudaraan universal, sumber daya sebagai amanah, berpola hidup sederhana dan yang terakhir adanya kebebasan manusia untuk beraktivitas (berusaha). Sedangkan yang ketiga adalah *’adalah* yang terkait erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan pokok, sumber pendapatan yang sah, pemerataan pendapatan dan kekayaan, pertumbuhan dan stabilitas (Chapra, 2000).

Lain halnya dengan Syed Nawab Naqvi. Menurutnya, karakter ekonomi Islam meliputi aspek *tawhid* (keesaan Tuhan), *al-'adl wa al-ihsan* (keseimbangan), adanya *ikhtiyar* bagi manusia (usaha-kehendak bebas), dan yang terakhir adanya *fardh*, yakni pertanggungjawaban (Naqvi, 1994). Pendapat terakhir ini mengandung sisi persamaan dengan apa yang dikemukakan oleh Adi warman A. Karim dan Murtadha Muthahhari yang mengedepankan lima aspek karakteristik, yakni *tawhid* (keesaan Tuhan), *al-'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (perwakilan-pemerintahan), dan *ma'ad (return)* (Karim, 2002; Muthahhari, 1992).

Bertolak dari ragam pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik ekonomi Islam memiliki tiga ciri utama sebagai berikut:

1. Bermuatan nilai-nilai **transenden-sipiritualistik** yang di dalamnya membawa pesan-pesan ke-Tuhan-an, selaku sumber ajaran dan Pemilik Mutlak kehidupan melalui utusan-Nya yang mengingatkan kepada manusia bahwa segala aktivitas kita, tanpa kecuali dalam bisnis kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
2. Menekankan peran **negara** (*state*) sebagai representasi tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi agar kesejahteraan semesta dapat terwujud di tengah masyarakat. Dengan demikian dalam hal ini negara perlu hadir untuk membangun kesejahteraan, sekaligus melakukan pengawasan atas segala kebijakan yang telah ditetapkan
3. Menekankan aspek **kemanusiaan** (*humanity*). Bukankah aktivitas ekonomi (bisnis-muamalah) merupakan kegiatan antarmanusia selaku subjek pelaku. Sebab itu dalam melakukan perannya, manusia diberi kebebasan untuk memilih atau berekspresi dengan tidak menafikan nilai-nilai moralitas dan keadilan di antara mereka.

Itulah karakteristik sistem ekonomi Islam yang tentu saja berbeda dengan sistem sekuler, antara lain dari aspek sumber ajaran, paradigma, posisi, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan pada bagian lain wacana ini.

D. Perbedaan dengan Sistem Sekuler: Sebuah Distingsi Karakteristik

1. Sistem Sekuler (Kapitalis dan Sosialis)

- Paradigma: Hanya berorientasi kepada kepentingan materi semata (materialistis)
- Sifat dan Kesetaraan: Bersifat ekstrim dengan mengedepankan ego pribadi (individual) sebagaimana ajaran kapitalisme. Atau ego kebersamaan (kelompok tertentu sebagaimana komunis (sosialisme) di mana peran negara sangat dominan sekali
- Sumber Ajaran: Merupakan produk perenungan manusia (*'aql-science*) yang tidak jarang bersifat ambigu atau banyak bias kepentingan
- Keuntungan/Profit: Menggunakan sistem *ribawi* (bunga-interes) yang berpotensi munculnya ketidakadilan
- Nilai/Sumber Etis: Ukuran nilai yang dipakai sebatas nilai etika produk logika atau moral produk kebiasaan (mores) dan kering dari nilai-nilai *spiritualistic* sehingga dalam praktiknya bersifat permissif
- Janji dan Ancaman: Janji (*reward*) dan ancaman hukuman (*punishment*) lebih bersifat materi, sedangkan hukuman yang ditimpakan hanyalah sebatas hukuman duniawi
- Motif Ekonomi: Dorongan utama yang dikedepankan adalah untuk mencari materi (kekayaan) semata

2. Sistem Religius (Ekonomi Islam)

- Paradigma: Menekankan pada aspek transenden spiritualistik (*uluhiyah-rabbaniyah*) dengan tidak mengabaikan yang bersifat duniawi (Qardhawi, 1995)
- Sifat dan kesetaraan: Bersifat inklusi (*moderasi-wasathiyah*) karena menyelaraskan kepentingan individu dan kelompok, materi dan spiritual, duniawi dan ukhrawi (Afzalurrahman, 1997; Sya'rawi, 1991; Djakfar, 2015)
- Sumber Ajaran: Sumber pokoknya adalah wahyu (*naql*-alquran dan sunnah) sebagai sumber selain *ijma'* (consensus ulama) dan *ijtihad* (penalaran analogis). Di samping sumber sekunder seperti *istihsan* (lebih disukai karena kebaikannya),

istislah atau *masalih mursalah* (pertimbangan kepentingan umum), *dharurah* (keperluan mendesak/emergensi) (Mannan, 1995; Taimiyah, 1997)

- Keuntungan/Profit: Antiribawi dengan menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing-nisbah*) dengan menggunakan sistem akad *syar'iyah* sehingga berkeadilan
- Nilai/Sumber Etis: Sejatinya ukuran nilai yang utama adalah ajaran akhlak dalam Islam yang bersumber dari wahyu sehingga lebih submissif dalam implementasinya
- Janji dan Ancaman: Janji (*reward*) dan ancaman (*punishment*) tidak saja bersifat materi (keduniawian) namun juga ada sanksi akhirat sebagai bagian dari ajaran *rahmatan lil 'alamin*
- Motif Ekonomi: Dorongan utama yang dikedepankan adalah untuk mencari materi (kekayaan), selain juga untuk ibadah (spiritual)

E. Etos Kerja dan *Prophetic Ethic*

Etos kerja dalam Islam merupakan energi spiritualistik karena sejatinya bekerja (*kasb*) merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan sebagai rasa tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi (Abdullah, 1979; Qardhawi, 1995; Djakfar, 2015) Bukankah Tuhan menciptakan jin dan manusia adalah untuk berbakti kepada-Nya (Adz-Dzaariyaat, 51:56). Selain juga sebagai sarana kebaikan dan bagian dari jihad yang menjadi tuntutan dalam syariat (Ahmad, 1995; Qardhawi, 1995; Djakfar, 2018).

Namun demikian sebagai ajaran *rahmatan lil 'alamin* (Saud, 1984), Alquran berpesan hendaknya dalam bekerja itu perlu ada keseimbangan. Misalnya segala harta yang kita miliki di dalamnya ada hak orang lain (Al-Ma'arij, 70:24-25). Artinya perlu ada pendistribusian atau pemerataan kekayaan di antara umat antara lain melalui kewajiban zakat. Sedangkan yang sunnah hukumnya melalui pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam sangat ditekankan adanya kepedulian sosial (filantropi) di kalangan masyarakat luas.

Selain itu Islam berpesan pula agar kita tidak saja memburu kepentingan duniawi semata dengan banyak mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya (At-Takatsur, 102:1-2). Namun perlu juga memburu kepentingan hidup di akhirat (spiritual)(Al-Qashash, 28:77) sebagaimana tergambar dalam tuntunan surat Al-Jumu'ah (62:10) yang menyatakan bahwa setelah melakukan shalat (Jumu'ah), hendaknya kita bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah (rezeki).

Akan tetapi dalam melakukan bisnis, Islam menekankan agar kita menjunjung tinggi nilai-nilai etis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw yakni bersikap *siddiq* (jujur-membangun kepercayaan), *fathanah* (cerdas-kreatif-inovatif), *amanah* (penuh rasa tanggung jawab) dan *tabligh* (komunikatif-menyampaikan secara objektif). Selain juga harus memiliki sikap *syaja'ah*, artinya mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan dalam bisnis (Afzalurrahman, 1997; Antonio, 2007; Djakfar, 2012). Namun demikian dalam setiap keputusan yang diambil perlu diimbangi dengan pertimbangan risiko yang akan terjadi.

Itulah nilai-nilai fundamental yang sejatinya memandu setiap pelaku bisnis agar segala harta yang diperoleh menjadi harta yang halal dan barakah menurut pandangan syariat agar kelak mendapat falah di depan Tuhan.

F. Subjek Pendukung dan Medan Pembumian

Agar nilai-nilai ekonomi Islam dapat dipahami oleh masyarakat luas, untuk selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka dengan sendirinya dibutuhkan subjek pendukung dari berbagai elemen masyarakat. Mereka adalah pemerintah (*negara/state*), para pelaku usaha, ulama, akademisi dan masyarakat (Afzalurrahman, 1997; Chapra, 2000; Qardhawi, 1995; Mannan, 1995; Taimiyah, 1`997; Siddiqi, 1979; Mansurnoor, 1990; Keddie, 1978).

Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam kaitan dengan suatu kebijakan (*goodwill*) pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang selama ini masih belum sedemikian populer di kalangan masyarakat luas. Peran itu bisa dalam bentuk lahirnya peraturan perundangan (regulasi) sebagai payung hukum pelaksanaan ekonomi Islam yang

selanjutnya dapat dilakukan pengawasan agar segala peraturan yang telah diundangkan berjalan sesuai harapan.

Selain itu subjek pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan (*support*) para pengusaha. Tanpa dukungan mereka niscaya sulit rasanya untuk mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam di dalam sektor riil. Karena sejatinya, merekalah eksekutor, sekaligus ujung tombak terdepan pelaksanaan sistem ekonomi yang berbasiskan syariah agar benar-benar membumi di tengah dominasi sistem sekuler di dunia bisnis, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Demikian pula peran sentral ulama tidak kalah strategisnya, terutama untuk menghasilkan fatwa hukum dan melakukan pengawasan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Tim Penulis DSN-MUI, 2003). Selain juga sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan dan tempat rujukan masyarakat dalam kaitan dengan masalah hukum ekonomi yang seringkali menjadi ganjalan banyak pihak.

Jika masyarakat telah mendapat pemahaman atau pencerahan, terlebih lagi ada *uswah* dari para ulama yang menjadi panutan umat, maka niscaya pelaksanaan ekonomi syariat akan mudah diterima kalangan luas. Artinya, mereka akan lebih tertarik dan termotivasi menjadi pengguna jasa lembaga-lembaga ekonomi syariah dengan segala macamnya.

Di samping itu bagaimanapun peran akademisi tidak kalah krusialnya dalam upaya untuk mensosialisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kapasitasnya sebagai guru atau dosen misalnya. Mereka dapat melakukan penulisan, penelitian, seminar, workshop dan lain sebagainya sesuai tugas pokoknya di sekolah dan di dunia perguruan tinggi.

Mereka itu dapat melakukan peran dan fungsi sesuai habitat masing-masing. Di lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi guru atau dosen dapat melakukan berbagai kegiatan sebagaimana yang telah disinggung di atas. Di kalangan masyarakat dapat dilakukan oleh para ulama atau tokoh masyarakat di mana mereka berada. Sedangkan di dalam keluarga dapat dilakukan oleh anggota keluarga masing-

masing dengan jalan secara langsung menjadi *stakeholders* lembaga-lembaga ekonomi Islam yang saat ini mulai tumbuh di tengah masyarakat luas.

G. Ekonomi Islam sebagai Instrumen Mewujudkan Kesejahteraan Semesta: Berbagai Konsep Yang Perlu Dipahami

Kesejahteraan semesta merupakan ekspresi ajaran *rahmatan lil 'alamin* dalam syariat Islam. Bukankah misi Rasulullah saw itu yang utama adalah membawa rahmat bagi seluruh alam (Al-Anbiyaa, 21:107) dengan tujuan akhir adalah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Al-Baqarah, 2:201)('Iwd, 1401H). Dalam kaitan ini dapat dipahami dari dasar teologis ajaran *rahmatan lil 'alamin* itu sendiri yang bersumber pokok dari Alquran yang dibawa oleh Rasulullah saw. Selain juga bersumber dari sifat-sifat Allah swt yang terpatrit di dalam *asma al husna*, terutama dari sifat al-Rahman dan al-Rahim-Nya. Dan dengan sifat Rahman-Nya Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam (Al-Baqarah, 2:251). Alquran sebagai kitab suci atau ajaran langit yang diturunkan melalui Rasul-Nya yang terakhir tidaklah hanya untuk orang Arab semata, namun juga diperuntukkan bagi seluruh umat manusia (An-Nisaa', 4:79) dan kehidupan semesta.

Karena itu untuk meraih kesejahteraan semesta salah satu aksesnya (*entry point*) adalah melalui aktivitas ekonomi (Chapra, 2000; Mannan, 1995; Qardhawi, 1995)). Untuk itu di antara konsep-konsep yang perlu dipahami dan dipraktikkan di dalam kehidupan semesta antara lain adalah:

- Konsep ekonomi Islam secara umum (Makro dan Mikro) (Chapra, 2000; Mannan, 1995; Karim, 2002)
- Masalah Produksi, Konsumsi dan Distribusi (Qardhawi, 1995; Mannan, 1995; Karim, 2002)
- Kewajiban Bekerja (Kasb): Motivasi Etos Kerja dalam Islam (Ahmad, 1995; Djakfar, 2009; Qardhawi, 2000)
- Masalah Kepemilikan: Individu, Kolektif, dan Negara (State) (Afzalurrahman, 1997; An-Nabhani, 1996; Djakfar, 2014)

- Menegakkan Keadilan dalam Bisnis: Penetapan Harga, Pengharaman Riba dan Monopoli, Hubungan Industrial) (Afzalurrahman, 1997; Qardhawi, 1995; Mannan, 1995; Chapra, 2000; Taimiyah, 1997)
- Mengedepankan Etika dalam Bisnis: Kepada Tuhan, Manusia, Lingkungan, dan Diri Sendiri) (Qardhawi, 1995; Djakfar, 2012; Syaikhun, 2012)
- Kewajiban Berbagi (Filantropi): Distribusi dan Pemerataan Kekayaan (An-Nabhani, 1996; Afzalurrahman, 1997; Siddiqi, 1979)
- Peran Strategis Negara (Afzalurrahman, 1997; Taimiyah, 1997; Qardhawi, 1995; Djakfar, 2015)
- Menyeimbangkan Kepentingan Duniawi (Material) dan Ukhrawi (Transenden-Spiritual) (Chapra, 2000)

H. Ikhtitam (Khulashah)

- Islam yang bersumber dari ajaran wahyu merupakan *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh kehidupan di jagad raya semesta
- Kesejahteraan semesta yang hakiki sebagai perwujudan ajaran *rahmatan lil 'alamin* hanya akan dapat dicapai antara lain melalui aktivitas ekonomi dengan panduan wahyu yang menyeimbangkan antara kepentingan material (*duniawi*) dan spiritual (*ukhrawi*) secara padu.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1979. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES
- Abu Saud, Mahmud. 1984. *Khutut Raisiyyah fi al-Iqtishad al-Islamiyyah*. Kuwait: Sahaba Islamic Press
- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, ter. Dewi Nurjulianti, dkk. Jakarta: Penerbit Yayasan Swarna Bhummy
- Ahmad, Mustaq. 1995. *Business Ethics in Islam*. Pakistan: The International Institute of Islamic Thought

Al-Qur'an al-Karim

- Antonio, Muhammad Syafii. 2007. *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Prophetic Leadership & Management Centre.
- Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, ter. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Anatomi Perilaku Bisnis Dialektika Etika dengan Realitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Plus.
- Djakfar, Muhammad. 2014. *Agama, Etika, dan Ekonomi Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Djakfar, Muhammad. 2015. *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi*. Revised Edifition. Malang: UIN Maliki Press.
- Djakfar, Muhammad. 2018. *Revitalization and Actualization of Religious to Realize Civilized Wasathiyah Economy*. Malang: Seminar ICONIES 22 September 2018
- 'Iwd, Ahmad Shafiyuddin. 1401H. *Ushul Ilm al'Iqtishad al Islamiy*. Riyad: Kulliyah al-Syariah
- Kahf, Monzer. 1979. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainted, Ind,: Muslim Student Association of U.S and Canada
- Karim, Adiwarmann A. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia
- Keddie, Nikki R (ed). 1978. *Scholars, Saints, and Sufis*. California: University of California Press
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. 2006. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan
- Mannan, Muhammad Abdul. 1995. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, ter. M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf

- Mansurnoor, Iik Arifin. 1990. *Islam in an Indonesian World, Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Muthahhari, Murtadha. 1992. *Islam Agama Keadilan*, ter. Agus Effendi. Jakarta: Pustaka Hidayah
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. 1994. *Islam, Economics, and Society*. London and New York: Kegan Paul International
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*. Kairo-Mesir: Maktabah Wahbah
- Siddiqi, Muhammad Najatullah. 1979. *The Economic Enterprise in Islam*. Lahore: Islamic Publications Ltd
- Syaikhun, Muhammad. 2012. *Al-Fikr al-Iqtishadiy lil Harakah al-Islamiyyah al-Mu'asarah*, Malang: Matba'ah al-Jamiah
- Sya'rawi, M. Mutawalli. 1991. *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, ter. H. Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press
- Zohar, Danah & Ian Marshall. 2005. *SC Spiritual Capital Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis*, ter. Helmi Mustofa. Bandung: Mizan